



Malioboro seperti Wilayah Tak Bertuan

Kembali Semrawut, Banyak Pelanggaran Didiamkan

JOGIA, Radar Jogja – Dampak ketiadaan petugas Jogoboro di kawasan Malioboro mulai dirasakan. Banyak pelanggaran di sana yang tidak di-tindak. Kembali semrawut seperti sebelum penataan.

Koordinator Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro, Suparno Sito menyebut, semrawutnya malioboro persis seperti kondisi beberapa tahun lalu sebelum adanya penataan. "Iya malioboro kembali seperti dulu lagi (semrawut)," kata Sito kemarin (26/1).

Dia menggambarkan, yang bikin Malioboro kembali semrawut yaitu pedagang liar, biasanya muncul secara mendadak setiap sore. Mereka seperti pedagang asongan gerobak dorong yakni pedagang cilok dan batagor. Padahal sebelumnya adanya peraturan pedagang liar yang tidak boleh memasuki kawasan Malioboro. "Tapi sekarang muncul lagi terutama yang di sisi Ramayana ke selatan," ujarnya.

Juga, penarik becak, andong, maupun ojek online yang tidak teratur bisa berhenti di tempat-tempat yang dilarang berhenti. Seharusnya kata dia ada tempat-tempat parkir yang sudah disediakan. Dampaknya mereka parkir bebas. "Kalau waktu ada Jogoboro kan selalu dihilau atau

diimbau untuk jalan pelan supaya tidak macet. Dan akhirnya sekarang *sakgeleme deve*," jelasnya.

Selain itu, juga munculnya pengamen liar. Seperti pengamen dengan tutup botol, menadah tangan, menyanyi hanya sekedar tepuk-tepuk tangan maupun alat-alat sederhana lainnya demi mengamen bebas di malioboro. Padahal sebelumnya, komunitas telah melakukan seleksi terhadap pengamen yang berpotensi dan diizinkan masuk ke kawasan wisata itu. "Yang tidak lolos seleksi akhirnya bermunculan lagi. Itu yang bikin tidak nyaman pengunjung yang baru mau makan atau duduk-duduk," tambahnya.

Tidak hanya itu, semrawutnya malioboro juga digambarkan pada sam-

pah yang berserakan. Sebab ketika adanya petugas Jogoboro setidaknya ada yang mengingatkan ketika pengunjung membuang sampah sembarangan atau sampah dari pengunjung yang hanya ditaruh begitu saja. "Biasanya diperingatkan kalau ada petugas," terangnya.

Selaku komunitas tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya pasrah sampai kapan kondisi tersebut berlarut-larut. Meski, selama Jogoboro *off* ada petugas yang membackup dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). "Tapi tidak maksimal seperti Jogoboro yang memang *stand-by* di malioboro. Satpol PP hanya sekedar lewat," katanya.

Sementara, Presidium Paguyuban

PKL Kawasan Malioboro, Sujarwo Putra menuturkan komunitas tidak mungkin melakukan tindakan pelanggaran. Karena itu menjadi domain pemerintah sebagai pemangku kewenangan. Namun dalam hal melaporkan sudah dilakukan oleh ketua-ketua Paguyuban PKL. "Kami kuatir kalau dibiarkan suasana kondusif yang mulai tumbuh dan berkembang, *set back* kembali ke titik nol. Bahkan, bisa tenggelam ke titik nadir," tuturnya.

Saat ini sebanyak 110 petugas Jogoboro dan sekitar 40 petugas kebersihan di Malioboro harus *off*. Itu karena ada perubahan anggaran di unit pelaksana teknis (UPT) Malioboro yang kini menggunakan dana keistimewaan. Sebelumnya, Kepala UPT

Malioboro, Ekwanto mengatakan *off*-nya petugas Jogoboro karena masih dalam proses lelang mencari penyedia jasa pihak ketiga yang memiliki kualifikasi mampu memana-jemen keamanan dan penyayuban di Malioboro. Prosesnya diperkirakan dalam waktu satu bulan. "Semoga Februari nanti sudah *running* ada pemenang lelang. Ini sesuai dengan yang user mau," katanya.

Untuk mengantisipasi sampah dan keamanan di Kawasan Malioboro dia dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja. Sedangkan untuk keamanan di *back-up* oleh petugas dari Satpol PP Jogja. "Sementara selama satu bulan kami dibantu itu," imbuhnya. (wia/pr/er)



IELANGGAR: Sejumlah pengemudi becak dan becak motor yang memarkirkan kendaraanya di jalur cepat Malioboro. Tidak ada yang melarang karena tak ada Jogoboro (foto kiri). PKL berjualan hingga ke jalur pedestrian (foto kanan)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Negatif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 13 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005